

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan transportasi yang makin maju sekarang ini, membuat dunia angkutan laut harus mengikuti sesuai perkembangan jaman. Hal inilah yang menyebabkan semua pihak yang terlibat di dalamnya berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan sebaik mungkin demi kelancaran kegiatan perekonomian di suatu pelabuhan.

Dalam hal ini, untuk mendukung aktifitas tersebut diperlukan tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya serta dilengkapi dengan sertifikat kompetensi sesuai *Standards of Training Certification Watchkeeping* (STCW) yang telah diatur oleh *International Organization Maritime* (IMO). Pada 25 Juni 2010, IMO dengan *stakeholder* utama lainnya dalam dunia industri pelayaran dan pengawakan global secara resmi meratifikasi apa yang disebut sebagai “Amandemen Manila” terhadap Konvensi Standar Pelatihan untuk Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Pelaut dan Aturan terkait.

Pemberlakuan ini berlaku secara global termasuk Indonesia. Seluruh *crew* dari mulai *officer* maupun *rating* diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi keahlian sesuai jabatannya dengan standar yang ditentukan. Penggunaanya diawasi setiap perusahaan pelayaran yang mempekerjakan *crew* diatas kapal.

Setiap *crew* yang *on board* diatas kapal diwajibkan juga melakukan *interview* dengan perusahaan pelayaran terkait yang sesuai, memahami setiap aturan dalam perusahaan dengan memperhatikan standar operasionalnya. Setelah itu, dilakukan Perjanjian Kerja Laut (PKL).

Menurut pasal 15 PP No. 2/1969 maka untuk mendapatkan izin penguasaan pelayaran nusantara harus dipenuhi syarat- syarat yaitu :

1. Merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka ia harus memiliki satuan kapal lebih dari satu unit dengan jumlah minimal 3000 m³ isi kotor dengan memperhatikan syarat teknis/naufis dan perhitungan untung- rugi.
2. Perusahaan pelayaran harus menyediakan modal kerja yang cukup untuk kelancaran usaha atas dasar norma-norma ekonomi perusahaan.

Jika izin terpenuhi, maka perusahaan pelayaran tersebut wajib melakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin
2. Mengumumkan kepada umum peraturan pelayaran kapal, tarif dan syarat-syarat pengangkutan
3. Menerima pengangkutan penumpang, barang, hewan dan pos satu dan lain sesuai dengan persyaratan teknis kapal
4. Memberikan prioritas pengangkutan kepada barang-barang sandang-pangan, bahan-bahan industri dan ekspor

Pada saat peneliti melaksanakan praktek darat selama 7 bulan di PT Samudera Indonesia Ship Management Jakarta, perusahaan ini melakukan PKL kepada *crew* sesuai aturan dari pemerintah dan setelah itu akan mendapatkan penilaian dari pihak kantor berupa *appraisal report*. Di setiap perusahaan pelayaran, pelaksanaan PKL disesuaikan dengan aturan pemerintah dan memiliki sistem penilaian *crew*, dari kedua sistem ini selalu ada permasalahan yang timbul terutama terhadap kontrak kerja dari beberapa faktor berikut :

1. Ketidaksesuaian aspek penilaian kantor dengan pasal yang ada di PKL
2. Sifat subjektif penilai/ pihak kantor

Mengenai *Research gap* terletak pada peneliti terdahulu, menurut Rochmat Triarto Prasetyo (2016) bahwa perjanjian kerja laut adalah suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban dan menentukan kontrak kerja. Bagi peneliti selanjutnya, manfaat yang didapat dari peneliti sebelumnya ialah pengetahuan bahwa pernyataan menurut Rochmat Triarto Prasetyo (2016) perjanjian kerja menentukan kontrak kerja setiap *crew* selain penilaian dari pihak perusahaan. Namun belum dijelaskan tentang analisis perbandingan perjanjian kerja laut dengan hasil *appraisal report*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk penelitian selanjutnya.

Dalam suatu sistem penilaian perusahaan, *appraisal report* ini dilakukan oleh *superintendent* sesuai dengan standar operasional perusahaan yang telah didasarkan dengan peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia dengan segala aspek penilaiannya untuk menentukan berapa lama kontrak di kapal milik

perusahaan begitu juga dengan sistim perjanjian kerja laut, membahas tentang kontrak kerja yang memiliki aturanya sendiri untuk dilakukan dengan setiap *crew*. Dalam penerapannya di perusahaan, *appraisal report* lebih cenderung bersifat subjektif dari *superintendent* yang menentukan kontrak *crew* padahal di perjanjian kerja laut tidak demikian. Ini yang menjadikan masalah dengan kedua sistem tersebut dan harus dilakukan perbandingan antara keduanya

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat masalah tentang perbandingan perjanjian kerja laut dengan hasil *appraisal report* dengan judul :

“ANALISIS PERBANDINGAN PERJANJIAN KERJA LAUT DENGAN HASIL *APPRAISAL REPORT* CREW KAPAL TINGKAT *OFFICER* OLEH *SUPERINTENDENT* PT.SAMUDERA INDONESIA SHIP MANAGEMENT JAKARTA”

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan ilmiah perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting, sebab perumusan masalah akan memudahkan dalam melakukan penelitian dan mencari jawaban yang lebih akurat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara penilaian kinerja dalam bentuk *appraisal report* ?
2. Bagaimana cara membandingkan antara perjanjian kerja laut dengan keputusan *appraisal report* ?
3. Bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul pada kedua sistem perjanjian tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis selama melaksanakan praktek darat , maka tujuan dari penulis skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui cara penilaian kinerja crew oleh *superintendent* melalui *appraisal report* sesuai standar operasional perusahaan yang telah disetujui oleh pihak terkait.
- b. Untuk mencari cara perbandingan yang tepat antara PKL dengan *appraisal report*, dengan melihat durasi kontrak kerja sebelumnya dan kompetensi yang sesuai .
- c. Untuk mengetahui cara penyelesaian masalah yang timbul dari kedua sistem tersebut dan tidak merugikan pihak *crew* serta menghindari tindakan subjektif dari *superintendent* atau pihak manapun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang strategi yang harus digunakan mengenai sistem perusahaan dengan perjanjian kerja laut. Untuk itu secara spesifik manfaat yang diharapkan yang dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang

perjanjian antara crew dengan perusahaan pemilik kapal mengenai penilaian dan aturan yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

- I. Untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama belajar guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dengan sebutan Sarjana Sains Ilmu Terapan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- II. Memberikan sumbangan pikiran pada taruna-taruni khususnya di bidang ilmu ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan tentang perjanjian kerja laut.
- III. Memberikan pikiran terbuka hal yang nyata di dalam dunia kerja sesungguhnya.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dari penulis dalam rangka penilaian kinerja *crew* dengan baik harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta penanganan yang tepat jika terdapat *crew* yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan instansi / perusahaan terkait.

c. Bagi Institusi

Sebagai tambahan referensi bagi bacaan dan informasi khususnya bagi taruna/taruni jurusan ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan (KALK) yang akan menyusun skripsi dan

memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan lingkungan kampus dan menambah khasanah dalam penelitian serta menambah koleksi perpustakaan.

d. Bagi taruna

- I. Dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan tentang perjanjian kerja laut sesuai dengan pasal 395 KUHD dan pasal 15 PP No.2/1969
- II. Menjadi wacana umum di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
- III. Menjadi inspirasi baru tentang dunia kerja dalam bidang pelayaran serta bidang terkait.

e. Bagi Pembaca

Berguna dalam hal wawasan dan menambah pengetahuan dalam penelitian ini khususnya bidang perjanjian kerja laut, penggunaan sertifikat keahlian sesuai STCW dan penilaian melalui *appraisal report* kinerja.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini ditulis agar lebih sistematis dan mudah dimengerti. Untuk mempermudah proses pemikiran dalam membahas permasalahan skripsi ”Analisis Perjanjian Kerja Laut dengan hasil *appraisal report* crew kapal tingkat officer oleh superintendent PT.Samudera Indonesia Ship Management Jakarta” maka peneliti menyusun dan menguraikan penjelasan secara singkat tentang

materi pokok dari skripsi. Kemudian penjelasan itu dapat digunakan untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti penyajian yang terdapat di dalam skripsi ini. Setelah itu penulis membuat sistematika dari judul menjadi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai uraian yang melatar belakangi pemilihan judul, perumusan masalah yang diambil, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang melandasi judul penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan utuh yang dijadikan landasan penyusunan kerangka pemikiran, dan definisi operasional tentang variabel atau istilah lain dalam penelitian yang dianggap penting.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV. ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil penelitian dan pemecahan masalah guna memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

BAB V. PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka akan ditarik kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan masalah. Dalam bab ini, penulis juga akan menyumbangkan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait sesuai dengan fungsi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

